

## KATA PENGANTAR

Pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa “Perguruan Tinggi wajib memiliki Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi”. Peraturan ini secara bersamaan dengan landasan hukum lainnya yakni Undang-undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi no. 44 Tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi telah mendorong semua lembaga Perguruan Tinggi negeri dan swasta untuk lebih merencanakan dan melaksanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan baik.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta turut berperan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam koridor kebijakan pemerintah sebagaimana dikemukakan di atas. Atas dasar ini LPPM telah menyiapkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk periode waktu 2016-2020.

Penyusunan Renstra ini mengacu kepada Pedoman Penyusunan Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Direktorat Pengabdian Masyarakat pada bulan April 2016. Untuk keperluan sinkronisasi, penyusunan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat ini juga merujuk kepada Rencana Induk Pengembangan Periode 2014-2043 dan Renstra Tahun 2015-2019 serta Rencana Induk Penelitian LPPM Tahun 2016-2020 dari Universitas Bung Hatta.

Semoga Renstra ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dalam rangka upaya menyejahterakan dan mencerdaskan masyarakat sebagaimana dikemukakan di atas.

Padang, 28 Oktober 2016

Ketua LPPM,

ttd

**Dr. Ir Abdullah Munzir, M.Si**

# DAFTAR ISI

Halaman

**LEMBAR PENGESAHAN  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI**

<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Pendirian Universitas.....	1
1.2 Dokumen Kebijakan Pengembangan .....	4
1.3 Pendekatan Penyusunan Renstra .....	5
<b>BAB II. LANDASAN RENSTRA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Dasar Nilai, Visi, Misi, dan Tujuan .....	7
2.2 Situasi dan Kondisi Aktual.....	9
2.3 Potensi Pengembangan.....	13
<b>BAB III GARIS BESAR RENSTRA .....</b>	<b>17</b>
3.1 Arah Pengembangan .....	17
3.2 Strategi Kebijakan Pengembangan.....	20
3.3 Dukungan Institusional .....	21
<b>BAB IV PROGRAM STRATEGIS .....</b>	<b>23</b>
4.1 Orientasi Pengembangan Program .....	23
4.2 <i>Roadmap</i> Pengembangan Program .....	24
4.3 Dukungan Finansial.....	24
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>26</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Pendirian Universitas**

Keberadaan Universitas Bung Hatta merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya membangun Sumber Daya Manusia Indonesia secara lokal, provinsial, dan nasional. Hal ini terlihat nyata dari latar belakang pendirian Universitas ini yaitu sebagai respon terhadap keterbatasan daya tampung Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada di Sumatera Barat pada awal tahun 1980-an. Pada masa itu terjadi ketimpangan perbandingan jumlah lulusan SLTA terhadap keterbatasannya daya tampung Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada di Sumatera Barat. Menjelang tahun ajaran 1980/1981 diprediksi tamatan SLTA di Sumatera Barat berjumlah 15.865 orang, sementara seluruh Perguruan Tinggi di Kota Padang pada saat itu diperkirakan hanya mampu menampung 6.007 orang atau 38% dari jumlah tamatan SLTA. Jika dijumlahkan dengan tamatan SLTA tahun sebelumnya yang belum memperoleh kesempatan masuk perguruan tinggi, maka jumlah ini mencapai 33.570 orang. Berdasarkan kenaikan jumlah tersebut diperkirakan 165.442 orang tamatan SLTA tidak akan mendapat tempat di perguruan tinggi sampai tahun 1989.

Dalam rangka menemukan solusi terhadap persoalan pendidikan tinggi untuk anak bangsa ini, Walikota Padang pada waktu itu Drs. H. Hasan Basri Durin melakukan inisiatif mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh pendidikan di Sumatera Barat. Hasil pertemuan menyepakati pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Padang untuk menampung lulusan SLTA di Sumatera Barat. Keputusan tersebut juga ditujukan untuk menyikapi sorotan berbagai pihak yang mengatakan bahwa Sumatera Barat tidak mampu memperlihatkan jati diri sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya manusia berkualitas.

Atas prakarsa Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Padang, diadakan pertemuan lanjutan antara pemuka masyarakat, tokoh pendidikan, dan pemerintah. Berdasarkan dokumen yang ada, dari dua kali pertemuan tersebut berbagai tokoh yang tetap aktif adalah Drs. H. Hasan Basri Durin, Drs. Adrin Kahar, Ph.D (Hon), Drs. H. Zuiyen Rais, M.S., Masri Usman, S.H., Prof. Dr. Alfian Lains, S.E., M.A., Prof. Dr. Jakub Isman, M. Zen Jamil, S.H., Prof. Drs. Mawardi Yunus, Ir. Sabri Kasim. Para tokoh inilah yang menyepakati berdirinya sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Pendidikan Wawasan Nusantara (YPWN) yang menaungi Universitas Bung Hatta.

Secara historis, ide pemberian nama untuk perguruan tinggi ini dilontarkan oleh Anas, S.H. dengan nama lengkap Universitas Muhammad Hatta. Namun, pada akhirnya disepakati nama yang diusulkan Prof. Dr. Jakub Isman, yaitu Universitas Bung Hatta. Nama itu disepakati oleh para pendiri setelah mempertimbangkan bahwa nama itu lebih menonjol semangat demokrasi dan nasionalisnya dibandingkan Universitas Muhammad Hatta. Apalagi banyak orang bernama Muhammad Hatta tetapi hanya satu orang bernama Bung Hatta, walaupun nama aslinya Muhamad Hatta.

Penggunaan nama besar Sang Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia itu dimaksudkan agar seluruh sivitas akademika Universitas Bung Hatta mampu mengemban misi untuk meneruskan cita-cita dan kepribadian Bung Hatta yang cinta ilmu pengetahuan, berdisiplin, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berjuang untuk kesatuan bangsa dan nusantara. Kesepakatan pemberian nama "Universitas Bung Hatta" dikonsultasikan oleh Drs. H. Hasan Basri Durin kepada keluarga Bung Hatta di antaranya Ibu Rahmi Hatta, putri-putri Bung Hatta, menantu, dan sekretaris pribadi almarhum Bung Hatta. Kesepakatan itu juga didukung oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Keluarga besar Bung Hatta tidak hanya sekedar memberi restu dan persetujuan, tetapi turut memberi dukungan moril dan materil antara lain:

membantu menghubungi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mendapat bantuan dan dukungan, sumbangan pikiran dalam rangka persiapan pendirian.

Pada mulanya, Ibu Rahmi Hatta dan keluarga agak ragu dan kurang yakin bahwa para pendiri akan serius mengurus perguruan tinggi swasta tersebut. Namun, karena pertimbangan kesadaran akan kebutuhan perguruan tinggi bertaraf nasional di Sumatera Barat, dan keyakinan akan keseriusan pengurusan yang ditekankan oleh pendiri yayasan, akhirnya Ibu Rahmi Hatta dan keluarga merestui dan menyetujui nama Bung Hatta digunakan sebagai nama universitas swasta itu. Sambutan keluarga Bung Hatta amat positif dan antusias. Malah, Ibu Rahmi Hatta sendiri langsung turun tangan menghubungi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI guna memohon bantuan dan dukungan. Keluarga Bung Hatta juga memberikan bantuan dalam rangka persiapan pendirian, pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru tahun pertama, dan peresmian berdirinya Universitas Bung Hatta. Ibu Rahmi Hatta dan keluarga juga memberikan informasi tentang keberadaan Universitas Bung Hatta dan menyampaikan himbauan kepada pimpinan perusahaan/pengusaha dan tokoh masyarakat tingkat nasional untuk memberikan bantuan dan dukungan atas keberadaan institusi ini.

Pendirian Universitas Bung Hatta mendapat restu dan izin operasional dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Nomor 006/PD/Kop.I 1981 pada tanggal 20 April 1981. Izin operasional diberikan untuk (1) Fakultas Ekonomi (2) Fakultas Hukum (3) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (4) Fakultas Pertanian (5) Fakultas Sastra dan (6) Fakultas Teknik. Fakultas Teknik Universitas Bung Hatta secara resmi dibuka pada tanggal 1 Desember 1981. Fakultas ini merupakan hasil integrasi dari Sekolah Tinggi Teknik Sumatera Barat (STTSB) yang sebelumnya bernama Institut Teknologi Sumatera Barat (ITSB). Pada perkembangan lanjut, diantara 3.600 Perguruan Tinggi di

Indonesia pada tahun 2016 ini Universitas Bung Hatta senantiasa berbenah diri agar tetap mampu merespon dinamika permasalahan yang berkembang di masyarakat dengan baik.

## **1.2 Dokumen Kebijakan Pengembangan**

Meskipun terlihat kecenderungan peningkatan kompetisi institusi pendidikan tinggi, Universitas Bung Hatta mencermati hal ini sebagai suatu peluang menjalin kerjasama pada tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu intervensi perguruan tinggi dari luar negeri dalam berbagai kiprah seperti rekrutmen calon-calon mahasiswa potensial, penelitian, sosialisasi dan promosi gagasan-gagasan kebijakan pembangunan, dan lain-lainnya bagi Universitas Bung Hatta disikapi dengan positif. Kebijakan strategis yang dilakukan Universitas Bung Hatta terhadap perkembangan demikian diantaranya adalah refleksi ke depan sebagai suatu upaya *positioning* Universitas Bung Hatta. Hal ini dirancang dalam dokumen-dokumen kebijakan perencanaan pengembangan seperti tersebut di bawah ini:

1. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bung Hatta 2014-2043.
2. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta Tahun 2015-2019.
3. Statuta Universitas Bung Hatta 2014.
4. Rencana Induk Penelitian 2016-2020.
5. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2016-2020.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Universitas Bung Hatta periode 2014-2043 didasarkan atas kebutuhan arahan jangka panjang (30 tahun kedua) sebagai periode kritis dalam pengembangan Universitas Bung Hatta ke depan. Penyusunan RIP 30 tahun UBH ke depan ini telah menempuh proses panjang meliputi proses

pengumpulan aspirasi dari segenap pimpinan universitas maupun fakultas. Sebuah lokakarya telah dilaksanakan untuk keperluan tersebut yang perumusan hasilnya lebih lanjut dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk secara khusus. Hasil yang diperoleh kemudian dikaji oleh berbagai pihak di lingkungan Universitas Bung Hatta sehingga kemudian diperoleh rumusan akhir RIP Universitas Bung Hatta periode 2014-2043. Sebagai tahapan penting dokumen ini telah memperoleh persetujuan melalui dua kali rapat Senat Universitas untuk dapat disetujui.

Dengan demikian diharapkan bahwa rumusan RIP Universitas Bung Hatta ini merupakan rumusan yang mewakili aspirasi seluruh sivitas akademika Universitas Bung Hatta yang dihasilkan melalui proses sesuai dengan prosedural akademik. Sementara itu, untuk panduan kebijakan dalam jangka waktu lima tahun telah dirumuskan Renstra Universitas Bung Hatta untuk periode waktu 2015-2019.

### **1.3 Pendekatan Penyusunan Renstra**

Berkaitan erat dengan hal yang dikemukakan di atas, Renstra Pengabdian kepada Masyarakat untuk Tahun 2016-2020 disusun berdasarkan arahan kebijakan yang terdapat dalam dokumen-dokumen rancangan pengembangan Universitas sebagaimana telah dijelaskan di atas. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat ini juga disusun sejalan dengan penyusunan dan pengesahan dokumen Rencana Induk Penelitian pada LPPM Universitas Bung Hatta untuk tahun yang sama (2016-2020). Penggunaan referensi dokumen-dokumen termaksud menggambarkan dua pendekatan yang digunakan LPPM dalam penyusunan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat yaitu pendekatan *top down* dan *bottom up*.

Pendekatan *top down* dimaksudkan adalah pendekatan yang menggunakan nilai-nilai utama yang terkandung dalam filosofi pendirian Universitas Bung Hatta dan

penggunaan nama besar Dr Muhammad Hatta sebagai tokoh bereputasi internasional sekaligus sebagai tokoh proklamator dan arsitek pembangunan bangsa Indonesia menuju masyarakat sejahtera dan cerdas. Nilai-nilai ini terekam dalam dokumen-dokumen pedoman pengembangan Universitas Bung Hatta sebagaimana telah dikemukakan. Karena, penyusunan dokumen tersebut mengintegrasikan pemikiran-pemikiran pimpinan Universitas Bung Hatta berdasarkan kajian-kajian yang telah dengan seksama dilakukan.

Pendekatan *bottom up* dimaksudkan adalah pendekatan yang menggunakan input dari kalangan para dosen peneliti. Sumber input ini adalah hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, diskusi-diskusi pada rapat koordinasi LPPM dengan peneliti, di samping masukan yang di peroleh di lapangan dari masyarakat luas. Termasuk ke dalam hal ini adalah input dari pengelolaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dewasa ini secara konseptual dikenal sebagai KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM).



## **BAB II**

### **LANDASAN RENSTRA**

Pendirian universitas ditujukan sebagai usaha untuk ikut menyaksikan pembangunan dalam bidang pendidikan, terutama dalam mengembangkan sektor pendidikan tinggi untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti tercantum dalam Pasal 31 (1) UUD 1945. Pada tahun 2016 Universitas Bung Hatta sudah memasuki usia 34 tahun. Pada usia cukup matang ini Universitas Bung Hatta berada pada tahap perkembangan yang harus senantiasa melakukan konsolidasi dan introspeksi dalam rangka upaya perbaikan terus menerus untuk menjadi Perguruan Tinggi yang disegani pada era globalisasi ini.

Pada kenyataannya Universitas Bung Hatta telah menjadi bagian dari masyarakat akademik internasional. Hal ini terlihat dari partisipasi dan peran Universitas Bung Hatta dalam berbagai program kegiatan internasional baik secara individual dari para dosen maupun secara institusional melalui kerjasama-kerjasama yang selama ini telah dan akan terus berlangsung. Secara teratur unit Humas Universitas Bung Hatta mengomunikasikan kegiatan-kegiatan demikian pada web [www.bunghatta.ac.id](http://www.bunghatta.ac.id).

Renstra Pengabdian kepada Masyarakat dari unit organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) disusun dengan mencermati tahap perkembangan yang telah dicapai dan arah yang dituju dalam tahap-tahap pengembangan Universitas Bung Hatta selanjutnya. Oleh karena itu, sebagai organ tubuh organisasi yang menjadi salah satu lini penting pada Universitas Bung Hatta, Renstra LPPM dimaksudkan untuk memperkuat derap langkah Universitas dalam mengembangkan nilai dasar, mewujudkan visi dan melaksanakan misi dalam rangka mencapai tujuan organisasi Universitas Bung Hatta sebagai berikut:

## 2.1 Nilai Dasar, Visi, Misi, dan Tujuan

Nama besar Dr. Mohammad Hatta yang disandang menjadi sumber inspirasi bagi pembentukan nilai dasar Universitas Bung Hatta yaitu meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta (disadur berdasarkan Mukadimah Statuta Universitas Bung Hatta tahun 2014). Asas **tradisi/local Wisdom** (adat) menyinari martabat Hatta yang menghargai ‘kekeluargaan dan kerakyatan’ dengan kata kunci “jangan lupa akar dan bumi tempat berpijak”. Asas **Intelektualisme** (nalar rasional/ akademik) menyinari martabat Hatta yang cendikia, berilmu padi. ‘Fikir itu pelita hati’. Asas **moralitas agama** dan etika menyinari martabat Hatta sebagai manusia taat yaitu “manusia adalah makhluk Tuhan”.

Pada tahun 2014, Universitas Bung Hatta memiliki visi misi baru yang telah disepakati dalam rapat Senat Universitas. Visi Universitas Bung Hatta adalah menjadi perguruan tinggi unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia sebagaimana dikemukakan pada Bab II pasal 3 Statuta Universitas Bung Hatta 2014.

Misi Universitas Bung Hatta adalah melaksanakan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam iklim yang demokratis dengan menjunjung tinggi kebebasan akademik dalam upaya mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Misi kehadiran Universitas Bung Hatta, tidak lagi hanya untuk menampung tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) saja, tetapi juga untuk menciptakan pemimpin masyarakat guna mengisi kepemimpinan bangsa dan negara untuk mencapai cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 seperti tercantum dalam Pasal 31 (1) UUD 1945. Universitas Bung Hatta diharapkan lebih menekankan mutu dan relevansi pengelolaan perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat terutama dalam kerangka otonomi daerah dan pendidikan.

Upaya mewujudkan visi dengan melakukan misi sebagaimana di atas adalah merupakan gerak langkah Universitas Universitas Bung Hatta untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan dunia global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi;
2. menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, serta menyebarkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan dan kepekaan sosial yang tinggi;
4. menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta;
5. menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban, dan kesejahteraan umat manusia,
6. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **2.2 Situasi dan Kondisi Aktual**

Universitas Bung Hatta telah melakukan berbagai upaya pengabdian kepada masyarakat yang dimodifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan dinamika yang terjadi pada masyarakat khususnya di Sumatera Barat. Namun demikian kepedulian

Universitas Bung Hatta sesuai dengan nilai dasar, visi, misi dan tujuan Universitas Bung Hatta mencakup wilayah yang luas baik secara nasional maupun regional dan internasional. Program pengabdian kepada masyarakat tersebut meliputi spektrum yang luas yakni berupaya memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan pendekatan keilmuan dan teknologi serta *networking* yang dimiliki para dosen dan institusi Universitas Bung Hatta.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan baik oleh kelompok dosen maupun oleh tim pengabdian terpadu antara dosen dan mahasiswa. Secara periodik sebagai bagian dari kegiatan akademik, Universitas Bung Hatta melalui unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pengabdian Masyarakat (KKN PPM). Pada tahun 2016 sebanyak 2011 mahasiswa Universitas Bung Hatta menyelenggarakan kegiatan KKN PPM dengan melibatkan Dosen Pendamping Lapangan dan dosen Koordinator Kabupaten/Kota tempat penyelenggaraan kegiatan KKN PPM. Universitas Bung Hatta juga berpartisipasi dalam kegiatan KKN Nasional. Pada masa datang dirancang kegiatan KKN Internasional bersama Perguruan Tinggi mitra kerja Universitas Bung Hatta di wilayah Asia Tenggara.

Perubahan tuntutan masyarakat dan respon dari institusi terhadap perubahan tersebut merupakan proses pembelajaran organisasi dan pembentukan reputasi yang mempengaruhi pengembangan strategi kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Universitas Bung Hatta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan untuk menangkap setiap gejala dari perubahan lingkungan akan menjadi faktor penentu kesuksesan bagi Universitas Bung Hatta.

Organisasi yang berani untuk melakukan eksperimen dan mampu belajar dari berbagai pengalamannya akan lebih sukses dibandingkan dengan organisasi yang tidak

melakukannya (Wheelen dan Hunger, 2002). Sejalan dengan pendapat ini (Marquardt, 1996) berpendapat bahwa untuk dapat mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing dalam lingkungan organisasi yang berubah dengan cepat, organisasi harus dapat meningkatkan kapasitas pembelajarannya. Dua pendapat tersebut memberikan makna bahwa perlunya kemampuan adaptasi yang kuat dari sebagai syarat suatu organisasi untuk dapat bertahan hidup sesuai dengan adagium *survival of the fittest*.

Otonomi daerah telah mendorong menjamurnya berbagai perguruan tinggi baru yang dibangun di daerah ibukota provinsi dan kabupaten sejalan dengan terbitnya peraturan dan perundang-undangan bagi pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Pada sisi lain, tuntutan pengguna (*stakeholder*) terhadap lulusan perguruan tinggi semakin bervariasi dan semakin meningkat. Sementara itu perubahan internal Universitas Bung Hatta terus berlangsung dengan berbagai kemajuan yang telah diraih.

Semakin banyaknya berdiri perguruan tinggi di kabupaten/kota semenjak digulirkannya kebijakan otonomi daerah. Kondisi ini menyebabkan alternatif pilihan perguruan tinggi menjadi lebih beragam dengan lokasi yang lebih dekat. Disamping itu karena pendirian perguruan tinggi tersebut didukung oleh pemerintah daerah maka biaya pendidikan yang ditawarkan menjadi lebih rendah karena memperoleh fasilitas dan dukungan dana dari pemerintah daerah setempat melalui APBD.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, undang-undang pendidikan tinggi juga mendorong berdirinya akademi komunitas di berbagai daerah. Walaupun segmen mahasiswa antara akademi komunitas dan universitas berbeda, namun dengan pendirian institusi vokasional di berbagai daerah tersebut meningkatkan persaingan dalam menarik minat lulusan SLTA. Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah dan distribusi berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan-perguruan tinggi baru yang bermunculan itu pada umumnya merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang

bernaung di bawah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) sebagaimana terlihat pada Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Jumlah dan Distribusi PT di Indonesia tahun 2011**

Kelompok	Universitas	Institut	Sekolah Tinggi	Akademi	Politeknik	Total
<b>PTN</b>	<b>52</b>	<b>7</b>	<b>1</b>		<b>32</b>	<b>92</b>
<b>PTS</b>	<b>426</b>	<b>50</b>	<b>1377</b>	<b>1121</b>	<b>150</b>	<b>3124</b>
Kopertis I	44	3	147	145	16	355
Kopertis II	25	1	99	76	10	211
Kopertis III	50	11	159	122	9	351
Kopertis IV	50	6	227	147	33	463
Kopertis V	18	4	42	60	8	132
Kopertis VI	34	2	79	119	22	256
Kopertis VII	75	12	150	95	12	344
Kopertis VIII	28	3	70	29	7	137
Kopertis IX	49	3	157	125	6	340
Kopertis X	21	2	116	116	8	263
Kopertis XI	18	1	74	70	12	175
Kopertis XII	14	2	57	17	7	97
<b>Total</b>	<b>478</b>	<b>57</b>	<b>1378</b>	<b>1121</b>	<b>182</b>	<b>3216</b>

Perkembangan situasi dan kondisi aktual yang juga menarik dicermati adalah kecenderungan semakin meningkatnya minat pihak eksternal baik industri dan pemerintah untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi baik dalam pemberian beasiswa termasuk bantuan pembiayaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Apalagi perusahaan-perusahaan besar senantiasa menyediakan anggaran *Corporate Social Responsibility* yang bisa diraih untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pencabutan UU BHP perguruan tinggi negeri oleh Mahkamah Konstitusi dan diberlakukannya UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, maka secara substansi tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan semakin tegas dan jelas. PTN didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, sementara PTS didirikan dan

diselenggarakan oleh masyarakat, sehingga pada dasarnya kedua lembaga tersebut tidak berbeda. Tanggung jawab utama pendidikan tinggi dalam hal ini berada pada pendiri/penyelenggara perguruan tinggi. Meskipun demikian, karena PTS juga mengemban misi mencerdaskan kehidupan bangsa, maka undang-undang pendidikan tinggi mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk turut serta membiayai PTS, antara lain dengan pemberian tunjangan jabatan dosen, tunjangan kehormatan profesor, dana penelitian, beasiswa bagi dosen untuk studi lanjut, beasiswa bagi mahasiswa, bahkan bantuan untuk biaya investasi dan pengembangan. Penjelasan Pasal 89 (b) undang-undang No 12 tahun 2012 juga menyebutkan bahwa Anggaran untuk PTS dialokasikan oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau oleh Pemerintah daerah dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dalam bentuk, antara lain hibah, bantuan program kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain bantuan pendanaan, PTS dapat memperoleh bantuan tenaga Dosen yang diangkat oleh Pemerintah. Pasal 89 ayat 6 kemudian menyebutkan bahwa Pemerintah juga harus mengalokasikan paling sedikit 30% dari dana pendidikan untuk dana penelitian dan PKM kepada perguruan tinggi, termasuk PTS. Melalui pola ini diskriminasi antara PTN dan PTS semakin tereduksi.

### **2.3 Potensi Pengembangan**

Potensi pengembangan pengabdian masyarakat sekaligus Universitas Bung Hatta secara intrinsik melekat pada nama besar Proklamator “Bung Hatta”. Nama tersebut merupakan modal besar sebagai *branding* Universitas ini. Manfaat “kekuatan” nama tersebut signifikan dalam upaya memajukan institusi. Hal ini mensyaratkan sumber daya organisasi untuk melaksanakan sistem nilai yang diwarisi dari “Bung

Hatta” secara taat dan konsisten dalam norma yang berlaku. Dengan kata lain, “kekuatan” nama terletak pada kemampuannya dalam memberikan sugesti bagi setiap anggota organisasi universitas dalam berperilaku, pola pikir dan pola tindak.

Universitas Bung Hatta didirikan oleh berbagai tokoh Sumatera Barat dengan semangat dan niat memajukan pendidikan di Sumatera Barat. Universitas ini memiliki visi, misi dan tujuan serta strategi pengembangan yang terus memberi peluang institusi ini untuk lebih maju. Sampai saat ini Universitas Bung Hatta tidak pernah menyampaikan klaim sebagai universitas milik pribadi maupun ormas tertentu, tetapi lebih sebagai universitas milik masyarakat sesuai dengan nama tokoh yang disandang universitas ini “Bung Hatta” sebagai milik bangsa Indonesia.

Sebagai PTS terbesar di kopertis wilayah X, Universitas Bung Hatta sudah memiliki sistem rekrutmen mahasiswa baru yang baik. Dengan akreditasi program studi rata-rata memiliki nilai “B” maka hal ini merupakan modal untuk maju dan berkembang. Apalagi masyarakat sudah paham dengan pentingnya akreditasi program studi dalam memilih universitas. Kinjerha rata-rata IPK lulusan juga sudah baik (IPK>3), prestasi non akademik mahasiswa sudah baik, persentase lulusan tepat waktu sudah baik (40%). Kondisi ini akan mendorong *stakeholder* untuk memilih dan meningkatkan pemanfaatan lulusan Universitas Bung Hatta.

Wujud kepercayaan masyarakat terhadap Universitas Bung Hatta juga terbukti dengan banyaknya dosen tetap yang dimanfaatkan oleh institusi lain sebagai tenaga ahli sesuai dengan kompetensi masing-masing dosen. Beberapa dosen tetap bahkan menjadi tenaga ahli untuk tingkat nasional maupun internasional dari beragam keahlian. Pengakuan yang sama terhadap kompetensi dosen juga diberikan oleh pemerintah melalui pemberian sertifikasi profesional kepada dosen tetap dengan jumlah cukup besar (57%). Kondisi ini merupakan peluang bagi Universitas Bung Hatta di dalam



meyakinkan stakeholders secara luas maupun elemen stakeholders yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. khususnya calon mahasiswa, untuk memilih lembaga pendidikan ini untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Penguatan organisasi melalui pembenahan internal manajemen dengan mengacu kepada konsep tata kelola universitas yang baik telah menjadi komitmen jajaran pimpinan di Universitas Bung Hatta. Melalui berbagai aktivitas organisasi universitas, komitmen pimpinan tergambar dalam upaya optimal dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan strategi institusi. Dengan dasar tersebut diharapkan organisasi melaksanakan aktivitasnya secara optimal sebagai suatu ciri organisasi yang “sehat”, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders kepada Universitas Bung Hatta.

Komitmen dosen dalam melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM), sebagai dua bagian pokok Tri Dharma Perguruan Tinggi, memperlihatkan indikator peningkatan yang berarti. Hal ini didukung dengan semakin besarnya alokasi dana untuk penelitian dan PKM setiap tahun. Kondisi ini menumbuhkan motivasi dan semangat yang tinggi bagi dosen untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pemerintah melalui Dikti juga telah mengakui keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta sebagai lembaga dengan *Cluster Madya* pertama di Kopertis Wilayah X. Kondisi capaian ini akan terus ditingkatkan melalui kerjasama penelitian dengan berbagai lembaga seperti pemerintahan, perguruan tinggi baik di dalam dan luar negeri, serta pihak swasta/industri. Kerjasama kelembagaan yang semakin luas ini menjadi kekuatan bagi Universitas Bung Hatta di dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, komitmen Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH) dalam mendukung pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sangat. Rata-rata setiap tahun YPBH

menyediakan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan skim pemula Rp. 8.000.000,- per judul. Ini merupakan insentif untuk proses pembelajaran dan motivasi bagi dosen untuk mampu meraih sumberd pembiayaan eksternal dengan mengembangkan kemampuan dalam penulisan proposal untuk pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## **BAB III**

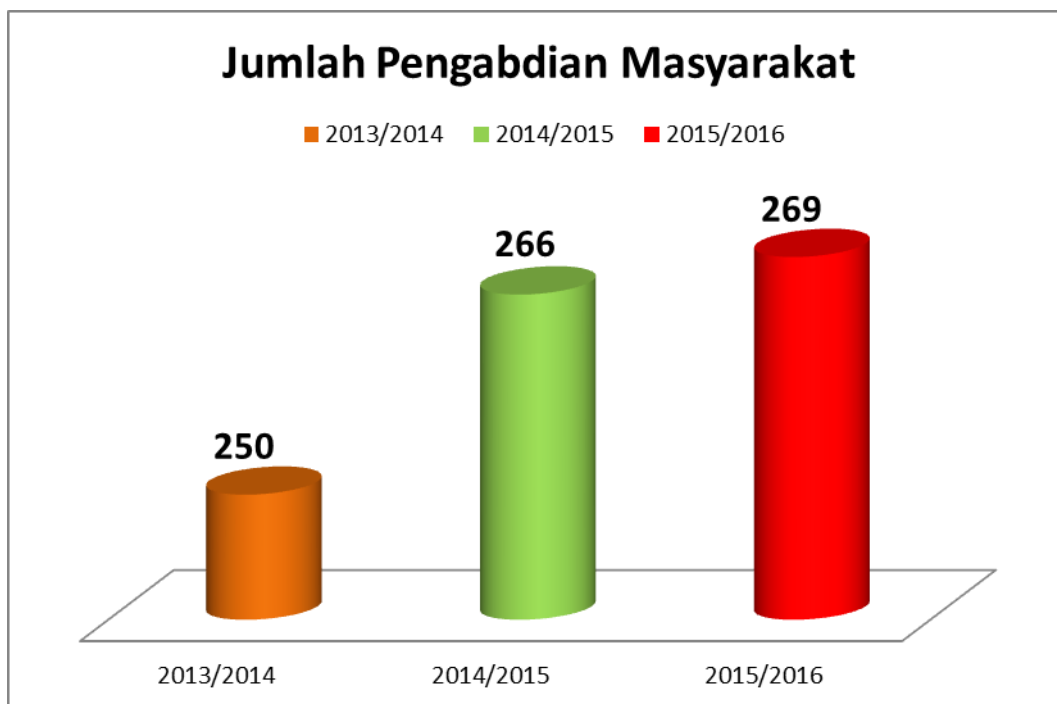
### **GARIS BESAR RENSTRA**

#### **3.1 Arah Pengembangan**

Meskipun pengelolaan Universitas Bung Hatta termasuk pengelolaan program pengabdian kepada masyarakat sudah diupayakan sebaik mungkin namun disadari bahwa tetap diperlukan berbagai perbaikan secara terus menerus (*continous improvement*). Untuk memberikan peran dan nilai tambah bagi *stakeholder* serta mewujudkan visi meraih posisi “Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Bermartabat Menuju Universitas Berkelas Dunia” diperlukan komitmen dan konsistensi dalam melakukan perbaikan tersebut pada arah pengembangan yang jelas.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan proses penerapan dari hasil pengembangan ilmu itu secara langsung untuk kemajuan masyarakat. Sehingga jelas bahwa faktor pemersatu Tridharma itu tidak lain adalah penguasaan ilmu itu sendiri yang operasionalnya melalui pemakaian ilmu tersebut dalam praktek yang bisa berdampak langsung atau tidak langsung pada upaya mencerdaskan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat.

Program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan LPPM adalah meningkatkan kontribusi perguruan tinggi pada pembangunan masyarakat dan pencapaian pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan KKN-PPM, yaitu meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat, mengembangkan pola pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk desa binaan, meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat berbasis riset, meningkatkan jumlah mitra baik institusi Pemerintah maupun Swasta dalam program pemberdayaan masyarakat. Produktifitas dari PKM untuk tiga tahun terakhir ditunjukkan pada Gambar berikut ini.



Gambar 1. Jumlah Pengabdian pada Masyarakat tahun 2013/2014 – 2015/2016

Dari Gambar 1 di atas terlihat peningkatan jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat dari tahun 2013 ke 2015. Melalui program peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan *workshop* penulisan proposal diharapkan para dosen lebih berkompeten dalam merancang program-program pengabdian kepada masyarakat yang dapat diusulkan kepada penyandang dana. Keadaan demikian akan berdampak pada perbaikan berkelanjutan dari proposal-proposal yang diusulkan sehingga akan lebih banyak lagi program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari Universitas Bung Hatta.

Upaya mempertahankan *trend* peningkatan kuantitas sekaligus melakukan peningkatan kualitas kinerja kegiatan pengabdian kepada masyarakat diperlukan penentuan arah pengembangan berdasarkan evaluasi terhadap pengalaman masa lalu, situasi dan kondisi aktual, serta analisis terhadap berbagai dinamika internal dan eksternal Universitas Bung Hatta. Dalam konteks ini, telah ditetapkan arah pengembangan yang dinilai rasional dan dapat ditempuh dengan baik sesuai dengan

potensi pengembangan yang tersedia. Arah dan garis besar rencana strategis pengembangan tersebut adalah:

Arah Renstra pengembangan periode 5 tahun pertama:

1. Hasil-hasil penelitian dosen ke dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka pengurangan kemiskinan dapat disimplifikasi dan diaplikasikan.
2. Intensitas keterlibatan dosen dalam perbaikan proposal dan perencanaan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat meningkat.
3. Perbaikan koordinasi program pengabdian masyarakat dalam pelaksanaan KKN PPM pada berbagai wilayah yang terpilih.
4. Perluasan jaringan kerja kegiatan pengabdian masyarakat secara lintas regional dan institusional.
5. Pengembangan upaya memperoleh sumber pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Arah Renstra pengembangan periode 5 tahun kedua:

1. Publikasi hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebar lebih luas.
2. Pembangunan model kemitraan pemberdayaan masyarakat antara elemen *stakeholders*.
3. Jaringan kerja internasional pengabdian masyarakat melalui KKN PPM internasional dapat dibangun.

Arah Renstra pengembangan periode 5 tahun ketiga:

1. Program pengabdian masyarakat dalam skema jaringan kerja internasional melalui KKN PPM internasional dapat direncanakan dan diimplementasikan.
2. Struktur organisasi bidang pengabdian kepada masyarakat dapat dikembangkan.
3. Standar Operasi Prosedur pada skema berbagai model kegiatan pengabdian masyarakat di Universitas Bung Hatta dapat dibangun dan fungsional dan menjadi referensi bagi lembaga lainnya.

### **3.2 Strategi Kebijakan Pengembangan**

Visi Universitas Bung Hatta “menjadi perguruan tinggi unggul dan bermartabat menuju universitas berkelas dunia” menyebabkan Universitas harus mampu menghadapi tantangan besar agar bisa mewujudkan visi tersebut. Dalam lingkup pengabdian kepada masyarakat tantangan besar itu dapat diidentifikasi dan disederhanakan dalam bentuk keberhasilan pengelola Universitas Bung Hatta membangun *trust* masyarakat luas terhadap kompetensi dan kontribusi signifikan Universitas Bung Hatta dalam memberikan solusi dan inovasi berbasis iptek dari berbagai pendekatan terhadap dinamika perubahan yang dialami masyarakat. Untuk menghadapi hal demikian, Universitas Bung Hatta harus mampu berkreasi untuk menciptakan tingkat kepuasan yang tinggi dalam memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat, dunia usaha, dan industri bahkan sebelum mereka datang menyodorkan kesulitan yang mereka hadapi.

Sebagai antisipasi terhadap perspektif masa depan berupa dinamika tantangan yang dihadapi, Universitas Bung Hatta menerapkan strategi pengembangan dan penguatan tata kelola internal, sistem dan jaringan informasi, serta memperkuat

hubungan kerjasama dengan berbagai institusi pada tingkat lokal, provinsial, nasional, regional, dan internasional. Selain itu Universitas Bung Hatta juga mengembangkan strategi peningkatan pelayanan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup:

- (1) Pengembangan kapasitas pengelolaan program pengabdian kepada masyarakat
- (2) Fasilitasi pengembangan tim pengabdian kepada masyarakat secara lintas disiplin ilmu dan integrasi mahasiswa dan dosen dalam implementasi program.
- (3) Fasilitasi konsultasi proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar mutu sehingga berdaya saing tinggi.
- (4) Pengutamaan program pengabdian kepada masyarakat terkait upaya peningkatan kualitas SDM.
- (5) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi pengabdian kepada masyarakat yang mudah diakses, tepat waktu, dan akurat,

### **3.3 Dukungan Institusional**

Pendelegasian kewenangan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bung Hatta sepenuhnya diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Secara institusional, kewenangan tersebut telah digunakan oleh LPPM untuk mengambil keputusan dan kebijakan program pengembangan pengabdian kepada masyarakat di dalam koridor kebijakan pimpinan Universitas dengan merujuk kepada dokumen-dokumen perencanaan yang telah disiapkan.

Secara internal, kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada umumnya dilaksanakan oleh para dosen baik secara individual maupun secara kelompok yang juga melibatkan unsur mahasiswa. Selain pola pelaksanaan seperti ini, juga dilakukan

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan langsung atas nama Program Studi yang biasanya melibatkan semua dosen tetap di dalam Program Studi tersebut. Adakalanya program kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh institusi Program Studi ini juga melibatkan unsur tenaga kependidikan. Hal ini dilakukan oleh Program Studi Budi Daya Perairan pada tahun 2016 dalam bentuk kegiatan penyuluhan perikanan di perairan umum Danau Maninjau.



## **BAB IV**

### **PROGRAM STRATEGIS**

#### **3.1 Orientasi Pengembangan Program**

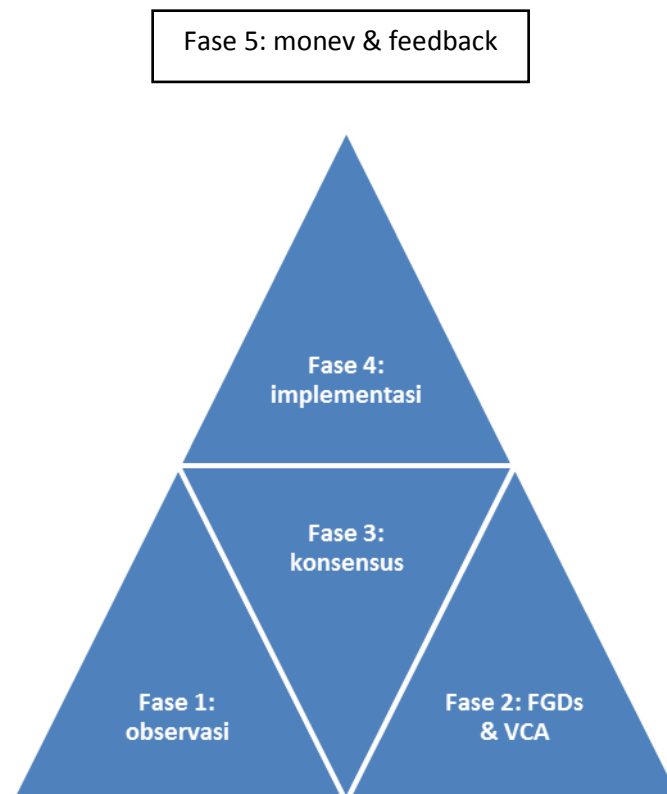
Keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melalui berbagai program pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan bagian dari eksistensi Universitas Bung Hatta. Universitas Bung Hatta mencermati bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi *concern* utama dari banyak pihak karena hal ini merupakan titik simpul dari berbagai persoalan ketidakberdayaan segmen masyarakat yang sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu pengembangan program pengabdian kepada masyarakat diorientasikan kepada aspek pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dengan penekanan pada pendekatan sosial ekonomi.

Orientasi pengembangan program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui beberapa fase orientasi yaitu:

- Fase 1: survei dan observasi lapangan untuk pemahaman masalah dan alternatif program solusi .
- Fase 2: pelaksanaan Focus Group Discussion bertahap dalam rangka pemetaan rantai nilai (Value Chain Mapping) terhadap prioritas fokus program pemberdayaan.
- Fase 3: perencanaan dan kesepakatan (konsensus) program pemberdayaan antara penerima manfaat (beneficiaries) sebagai *core stakeholders* dan elemen stakeholders lainnya.
- Fase 4: impementasi program pemberdayaan.
- Fase 5: monitoring dan evaluasi serta *feedback* untuk keberlanjutan program pemberdayaan.

### 3.2 Roadmap Pengembangan Program

Roadmap pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berupa fase-fase yang akan dijalani dalam rangkaian kegiatan pemberdayaan disederhanakan dalam gambar berikut.



Gambar 2. Roadmap Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat

### 3.3 Dukungan Finansial

Secara periodik, setiap unit di Universitas merumuskan program pengembangan dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk mendukung program tersebut. Program beserta RAB termaksud diusulkan kepada pimpinan Universitas untuk selanjutnya dibahas oleh tim anggaran. Setelah melewati proses persetujuan pada tingkat Universitas, program pengembangan dan RAB tersebut diusulkan kepada Yayasan Pendidikan Bung Hatta untuk selanjut didiskusikan dan disepakati antara pihak

Yayasan dan Rektorat. Mekanisme perencanaan program kerja dan penganggaran demikian berlangsung setiap tahun.

Sebagaimana unit kerja lainnya pada lingkungan Universitas Bung Hatta, LPPM juga memperoleh dukungan institusional dan finansial untuk melancarkan program kerja dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dukungan institusional dan finansial juga didapatkan LPPM melalui kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta. Misalnya dengan berbagai instansi pemerintahan berupa SKPD dan Badan Pemberdayaan Masyarakat baik pada tingkat Provinsi maupun tingkat Daerah. Pada tahun 2016 hasil kerjasama penelitian tentang ikan gurami antara LPPM dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota yang sudah berlangsung tiga tahun berhasil melewati Uji Rilis Kementerian Perikanan dan Kelautan terhadap jenis Ikan Gurami Sago dari daerah perairan Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini sepenuhnya didanai oleh pihak Dinas terkait dan dapat dimodifikasi menjadi program pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan teknologi pembenihan.

Kemajuan kegiatan di LPPM Universitas Bung Hatta sebagaimana dikemukakan di atas merupakan pembuktian kepercayaan dan dukungan institusional dan finansial dari lembaga eksternal sebagaimana halnya LPPM mendapat dukungan institusional dan finansial yang kuat secara internal terhadap pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dukungan finansial eksternal yang selama ini sudah lazim diraih oleh LPPM Universitas Bung Hatta adalah berasal dari skema pendanaan pengabdian masyarakat dan hibah KKN PPM Kemenristek Dikti. Program kegiatan untuk meningkatkan perolehan pendanaan tersebut akan selalu dikembangkan secara berkelanjutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana strategis pengabdian kepada masyarakat dengan arah dan strategi kebijakan pengembangan program sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya akan berimplikasi pada alokasi sumberdaya dan pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan. Aspek komitmen, konsistensi, dan pengelolaan sumberdaya sangat menentukan dalam keberhasilan pencapaian pelaksanaan program. Semua ini berimplikasi pada pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi.

Keteraturan rangkaian kegiatan terutama dalam menapaki fase-fase yang terdapat pada roadmap pengembangan program sangat ditentukan pula oleh penempatan SDM yang tepat pada waktu yang bersesuaian. Jika terabaikan, maka hal ini akan berimplikasi pada inefisiensi pemanfaatan sumberdaya termasuk sumberdaya waktu dan inefektivitas pencapaian program pengembangan. Keadaan demikian sangat berhubungan dengan aspek kepemimpinan.

Pengalaman panjang proses pembangunan dan pengembangan Universitas Bung Hatta sebagaimana juga pada institusi pendidikan tinggi lainnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak bahwa aspek kepemimpinan merupakan *vital point* dalam keberhasilan implementasi perencanaan program pengembangan. Pemimpin yang mampu melakukan simplifikasi dan menawarkan alternatif solusi terhadap kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi akan menjadi *energy charger* pada setiap upaya pencapaian kemajuan. Sebaliknya, kepemimpinan yang tidak mampu melakukan itu baik disengaja atau tidak, akan cenderung menciptakan konflik. Kredibilitas suatu kepemimpinan akan sangat teruji dalam keberhasilannya membangun *trust* dalam interaksi SDM yang terlibat pada setiap proses manajemen.

Ini akan menjadi kata kunci dalam keberhasilan implementasi rencana strategis pengembangan program pengabdian kepada masyarakat dari unit LPPM dan pengembangan institusi Universitas Bung Hatta secara keseluruhan pada hari ini dan esok hari.